BAHAS RAKERNAS, DPR AKAN SAHKAN RUU PERKUAT OMBUDSMAN

Senin, 15 Juli 2024 - kepri

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengupayakan pengesahan RUU revisi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelum paripurna tugas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agnas dihadapan seluruh unsur pimpinan Ombudsman RI dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Supratman mengungkapkan keyakinan DPR untuk terus memperkuat kelembagaan Ombudsman RI sebagai pengawas pelayanan publik di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau Lagat Parroha Patar Siadari seusai mengikuti kegiatan Rakernas I Ombudsman RI yang dihadiri seluruh unsur pimpinan dan kepala perwakilan seluruh Indonesia tanggal 8 - 12 Juli 2024 di Jakarta. Adapun kegiatan ini mengambil tema Konsolidasi Pengawasan Kinerja dan Penyusunan Program Ombudsman Republik Indonesia.

Selain membahas terkait pengesahan RUU revisi UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Lagat menyatakan bahwa ada 3 topik utama yang dibahas dalam rakernas.

Pertama, konsolidasi dan penyelesaian program kerja tahun 2024. Kedua, Evaluasi capaian rencana strategis 2020-2024 dan pemaparan rencana kerja tahun 2025. Ketiga, menyusun arah kebijakan dan target kinerja tahun 2025-2029.

"Tantangan yang dihadapi Ombudsman RI dalam menyusun rencana kerjanya 5 tahun kedepan (RPJMN 2025-2029) adalah akan dilakukannya transisi pemerintahan lama ke yang baru, maka program yang akan disusun harus menyesuaikan visi dan misi pemerintahan baru nanti," ujar Lagat.

Selanjutnya menurut Lagat, pada rakernas dibahas hasil kinerja seluruh unit kerja Ombudsman dan dilakukan evaluasi rencana percepatan penyelesaian laporan.

"Capaian kinerja penyelesaian laporan perwakilan Ombudsman Kepri sampai triwulan II mencapai 40% di bawah target yang ditentukan 46% dari keseluruhan 230 laporan. Namun kami optimis akan memenuhi target tersebut sampai akhir tahun 2024 apalagi akan ada penambahan pegawai baru yang akan difungsikan membantu proses pemeriksaan laporan," tutupnya.